



## Disparitas dan Konvergensi Pendapatan Per Kapita pada Kawasan Kedungsepur

Nashif Satria Ramadhan<sup>1</sup>, Siskarossa Ika Oktora<sup>2\*</sup>)

<sup>1,2</sup>Politeknik Statistika STIS

\*) Penulis Korespondensi : [siskarossa@stis.ac.id](mailto:siskarossa@stis.ac.id)

**Abstract.** Kedungsepur is an area designated as the primary center of economic growth in Central Java, thus becoming the region with the highest total Gross Regional Domestic Product (GRDP) among its regencies and cities. However, this achievement is not accompanied by equitable income distribution among its constituent regencies and municipalities. This study aims to examine the disparities and analyze the existence of per capita income convergence and its influencing factors in Kedungsepur from 2017 to 2022. Descriptive analysis found that income disparities in Kedungsepur have escalated over the past six years. Furthermore, there has been a transition to a better economic pattern in some areas, namely Kendal Regency and Grobogan Regency. The level of dispersion of GRDP per capita among regencies/municipalities has also increased, thereby disproving the occurrence of sigma convergence. Based on the results of modeling with dynamic panel regression FD-GMM, it is concluded that absolute and conditional beta convergence is occurring in Kedungsepur. Significant variables affecting GRDP per capita include TPT, RLS, PAD, and population size, while the percentage of roads in good condition does not exhibit a significant impact on GRDP per capita. Therefore, local governments can optimize sources of regional revenue, enhance employment opportunities and the quality of education, as well as effectively manage population growth.

**Keyword:** income disparities, convergence, dynamic panel, FD-GMM, Kedungsepur

**Abstraksi.** Kedungsepur merupakan kawasan yang dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah sehingga menjadi kawasan dengan total PDRB kabupaten/kota tertinggi di provinsi tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji disparitas serta menganalisis eksistensi konvergensi pendapatan per kapita dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kedungsepur pada tahun 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di Kedungsepur semakin meningkat. Selanjutnya, terjadi transisi pola perekonomian yang lebih baik pada beberapa daerah, yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan. Tingkat penyebaran PDRB per kapita antar kabupaten/kota juga semakin meningkat sehingga tidak terbukti terjadi konvergensi sigma. Berdasarkan hasil pemodelan dengan regresi panel dinamis FD-GMM, disimpulkan terjadi konvergensi beta absolut dan kondisional di Kedungsepur. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita adalah TPT, RLS, PAD, dan jumlah penduduk, sedangkan persentase panjang jalan kondisi baik tidak signifikan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PAD, meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas pendidikan, serta mengendalikan jumlah penduduk dengan baik.

**Kata kunci:** disparitas pendapatan, konvergensi, panel dinamis, FD-GMM, Kedungsepur

diunggah: Maret 2024; direvisi: September 2024; disetujui: Oktober 2024

This is an open access article under the CC-BY licence



© the Author(s). 2024

Cara Sitasi: Ramadhan, Nashif Satria & Oktora, Siskarossa Ika (2024). Disparitas dan Konvergensi Pendapatan Per Kapita pada Kawasan Kedungsepur. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 8(2), 187-209-. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i2.497>

## PENDAHULUAN

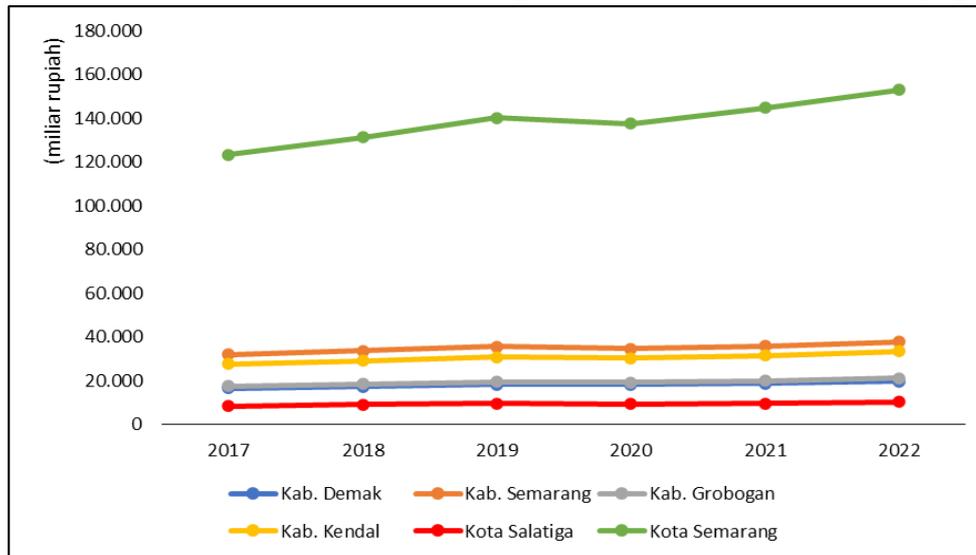
### Latar Belakang

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan sekaligus perekonomian di Indonesia sampai saat ini. Hal ini dapat terlihat dari besarnya kontribusi Pulau Jawa yang mencapai 59,34 persen dari total PDB Indonesia pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Empat peringkat teratas pada nilai PDRB diduduki oleh provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, salah satunya Jawa Tengah. Jika dilihat berdasarkan posisi PDRB per kapita, Jawa Tengah berada pada peringkat sepuluh besar terbawah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah masih kurang baik dibandingkan provinsi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian membentuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagai perwujudan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan perekonomian daerah yang dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan perkembangan antarwilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan membagi habis wilayah Jawa Tengah menjadi beberapa kawasan. Salah satu kawasan yang terbentuk yaitu Kedungsepur, yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2018-2023, Kawasan Kedungsepur diarahkan pada perwujudan kawasan metropolitan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus, berperan sebagai pusat distribusi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura, serta merupakan wilayah transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Secara umum tren PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kawasan Kedungsepur mengalami peningkatan dari tahun 2017-2022 (BPS, 2022). Kemudian selama enam tahun terakhir, wilayah ini memiliki PDRB ADHK yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini sejalan dengan dijadikannya Kawasan Kedungsepur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Akan tetapi, kebijakan tersebut ternyata memiliki dampak negatif yaitu munculnya *gap* yang cukup jauh antara PDRB ADHK Kedungsepur dengan kawasan lainnya.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa sejak 2017 PDRB Kota Semarang selalu berada di puncak dan memiliki *gap* yang sangat jauh dengan daerah lain. Perekonomian di daerah lain seharusnya mampu berkembang bersama sehingga distribusi pendapatan akan merata untuk seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur. Selain itu, diketahui bahwa pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota di Kedungsepur mengalami ketimpangan, dimana daerah kota memiliki pengeluaran per kapita dengan rata-rata 15 juta rupiah, sedangkan daerah kabupaten hanya berkisar 10-12 juta rupiah. Padahal pengeluaran per kapita merupakan salah satu faktor yang signifikan memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat

(Indrayanti, 2020). Oleh karena itu, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata untuk seluruh kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur.



Gambar 1. PDRB ADHK kabupaten/kota di Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa pembangunan Kedungsepur hanya terkonsentrasi di pusat kawasan. Hal ini mengakibatkan tingginya pendapatan di Kedungsepur tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena adanya disparitas pendapatan. Akan tetapi, melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2019 pemerintah telah menetapkan tiga kawasan yang menjadi perhatian utama dalam hal percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, yaitu Kedungsepur, Purwomanggung (Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung), dan Bregasmalang (Brebes-Tegal-Pemalang). Pemerintah menyiapkan strategi melalui tiga prinsip konektivitas yaitu keterpaduan kawasan, keterkaitan daerah dengan pusat kawasan, dan menghubungkan daerah terpencil melalui infrastruktur dan pelayanan dasar. Jika hal ini mampu diimplementasikan, maka daerah dengan pendapatan kecil akan mampu berkembang dan mulai mengejar ketertinggalannya dengan pusat kawasan.

Perekonomian daerah mempunyai peran penting terhadap kesuksesan ekonomi nasional, karena apabila target perekonomian di daerah terpenuhi maka perekonomian nasional akan ikut meningkat (Mevia, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, maka kabupaten/kota di Kedungsepur perlu berkembang bersama, bahkan perkembangan kabupaten/kota dengan pendapatan kecil sebaiknya perlu didorong lebih kuat untuk mengurangi disparitas pendapatan dan bisa mencapai titik konvergen di waktu yang akan datang. Ketika pendapatan di Kawasan Kedungsepur telah konvergen, maka target pemerataan perekonomian kawasan lain mampu dicapai sehingga kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi PDRB per kapita sehingga terjadi konvergensi pendapatan di Kawasan Kedungsepur.

Penelitian dengan topik konvergensi pendapatan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi cakupannya masih terbatas, yakni hanya sampai level provinsi, seperti Putro (2022) meneliti di KBI, KTI, dan secara nasional. Hasilnya konvergensi pendapatan dipengaruhi oleh faktor modal fisik, IPM, tenaga kerja, dan teknologi. Penelitian selanjutnya, Sinaga et al. (2023) meneliti di lima pulau besar di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap terjadinya konvergensi pendapatan. Sementara itu, penelitian di Kawasan Kedungsepur juga masih terbatas pada analisis deskriptif mengenai disparitas pendapatan, seperti Majiid & Woyanti (2023) dengan menggunakan Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil, Location Quotient (LQ), dan Shift-Share mampu menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2021 relatif tinggi dan cenderung mengalami kenaikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji disparitas pendapatan yang terjadi serta melakukan pendalaman analisis terkait konvergensi pendapatan per kapita di Kawasan Kedungsepur.

### **Kajian Teori**

Teori Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi dan kemajuan teknologi (Solow, 1956). Jumlah tenaga kerja yang meningkat akan berpengaruh positif terhadap peningkatan output sehingga pendapatan per kapita suatu daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja menurun atau jumlah pengangguran di suatu daerah meningkat, maka akan menghambat produktivitas sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Fauzan et al., 2023).

Selanjutnya, kapital/modal pada penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk finansial, fisik, dan manusia. Modal finansial dapat didekati dengan pendapatan asli daerah. Dini & Siregar (2021) dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Modal fisik atau infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang dikembangkan guna menjalankan fungsi-fungsi seperti penyediaan air, tenaga listrik, transportasi, pembuangan limbah, dan pelayanan lainnya. Infrastruktur jalan merupakan salah satu jenis infrastruktur yang memiliki kaitan dengan perekonomian, sebab seiring berkembangnya infrastruktur jalan di suatu daerah maka arus barang dan jasa semakin lancar sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan meningkat (Maudita & Susilo, 2023). Terakhir, modal manusia yang menggambarkan kemampuan atau keahlian tenaga kerja yang diaplikasikan selama proses produksi. Modal manusia atau dalam teori pertumbuhan endogen disebut investasi sumber daya manusia diantaranya dapat dilihat melalui bidang pendidikan. Zega et al. (2022) menyimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah membawa pengaruh positif terhadap percepatan konvergensi perekonomian suatu wilayah.

Dalam model Solow juga dikembangkan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap PDRB per kapita untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Suatu daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat akan menurunkan nilai capital per worker dan

kemudian pada akhirnya akan menurunkan PDRB per kapita wilayah tersebut (Mankiw, 2012).

Konsep konvergensi dibagi menjadi dua, yaitu konvergensi sigma dan konvergensi beta. Ketika tingkat penyebaran PDRB per kapita riil sekelompok negara menurun sepanjang waktu, maka dikatakan terjadi konvergensi sigma (Sala-i-Martin, 1996). Sedangkan, konvergensi beta terjadi ketika negara dengan perekonomian miskin mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan negara kaya (Barro, 1992).

**METODE PENELITIAN**

Cakupan penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Terdapat enam variabel, yaitu PDRB per kapita (juta rupiah), tingkat pengangguran terbuka (persen), pendapatan asli daerah (ribu rupiah), persentase panjang jalan dalam kondisi baik (persen), rata-rata lama sekolah (tahun), dan jumlah penduduk (jiwa).

Terdapat dua jenis metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia. Metode analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai faktor-faktor yang diduga memengaruhi konvergensi pendapatan di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2022. Kemudian, untuk memberikan gambaran umum terkait disparitas pendapatan dan pola pertumbuhan ekonomi Kawasan Kedungsepur dilakukan analisis menggunakan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Indeks Williamson dapat dihitung dengan formula berikut.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \frac{Pop_i}{Pop}}}{Y} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

$Y_i$  = PDRB per kapita daerah ke- $i$

$Y$  = PDRB per kapita sekelompok daerah  $Pop_i$  = Jumlah penduduk daerah ke- $i$

$Pop$  = Jumlah penduduk sekelompok daerah

Sedangkan Tipologi Klassen dalam penelitian ini akan membentuk kabupaten/kota di Kedungsepur menjadi empat kategori berdasarkan kriteria di bawah ini.

Tabel 1.  
 Kategori dalam Tipologi Klassen

Kriteria	$y_i < Y$	$y_i > Y$
$p_i > P$	Kuadran II (Daerah sedang berkembang)	Kuadran I (Daerah maju dan tumbuh cepat)
$p_i < P$	Kuadran IV (Daerah relatif tertinggal)	Kuadran III (Daerah maju tetapi tertekan)

Keterangan:

- $p_i$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ke- $i$  di Kedungsepur
- $P$  = Rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur
- $y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- $i$  di Kedungsepur
- $Y$  = Rata-rata PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur

Selain itu, terdapat ukuran koefisien variasi yang dirumuskan seperti berikut.

$$CV = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i - \bar{Y}}{\bar{Y}}\right)^2} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

$\bar{Y}$  = rata-rata PDRB per kapita dari  $n$  daerah

$n$  = Jumlah daerah

Selanjutnya, metode analisis inferensia pada penelitian ini dilakukan menggunakan regresi data panel dinamis untuk menganalisis konvergensi beta absolut dan kondisional di Kawasan Kedungsepur. Adanya *lag* variabel dependen pada model panel dinamis akan menimbulkan masalah endogenitas karena memiliki korelasi dengan *error*, sehingga asumsi klasik tidak dapat dipenuhi (Gujarati, 2008). Berikut merupakan model yang dibangun.

1. Konvergensi Beta Absolut

$$\ln \text{Perkapita}_{it} = \beta_1 \ln \text{Perkapita}_{i,t-1} + u_{it} \dots\dots\dots (3)$$

2. Konvergensi Beta Kondisional

$$\ln \text{Perkapita}_{it} = \beta_1 \ln \text{Perkapita}_{i,t-1} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{RLS}_{it} + \beta_4 \ln \text{PAD}_{it} + \beta_5 \text{PJalanBaik}_{it} + \beta_6 \ln \text{Pop}_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- $\ln \text{Perkapita}_{it}$  = logaritma natural PDRB per kapita daerah ke- $i$  tahun ke- $t$
- $\ln \text{Perkapita}_{i,t-1}$  = logaritma natural PDRB per kapita daerah ke- $i$  tahun ke- $(t - 1)$
- $\text{TPT}_{it}$  = tingkat pengangguran terbuka daerah ke- $i$  tahun ke- $t$
- $\text{RLS}_{it}$  = rata-rata lama sekolah daerah ke- $i$  tahun ke- $t$
- $\ln \text{PAD}_{it}$  = logaritma natural pendapatan asli daerah daerah ke- $i$  tahun ke- $t$
- $\text{PJalanBaik}_{it}$  = persentase jalan kondisi baik daerah ke- $i$  tahun ke- $t$
- $\ln \text{Pop}_{it}$  = logaritma natural jumlah penduduk daerah ke- $i$  tahun ke- $t$
- $\beta_k$  = *slope* variabel bebas ke- $k$
- $k$  = variabel bebas (1,2,...,6)
- $u_{it}$  = *error term*

Tercapainya konvergensi diindikasikan melalui nilai koefisien lag variabel endogen yang positif kurang dari satu dan signifikan memengaruhi variabel endogen (Islam, 1995). Semakin mendekati nol, maka proses konvergensi akan semakin cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah kondisi konvergen pun akan lebih singkat. Berikut merupakan rumus untuk menghitung kedua ukuran tersebut.

$$\text{implied } \lambda = -\ln(\beta_1) \dots\dots\dots (5)$$

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} \dots\dots\dots (6)$$

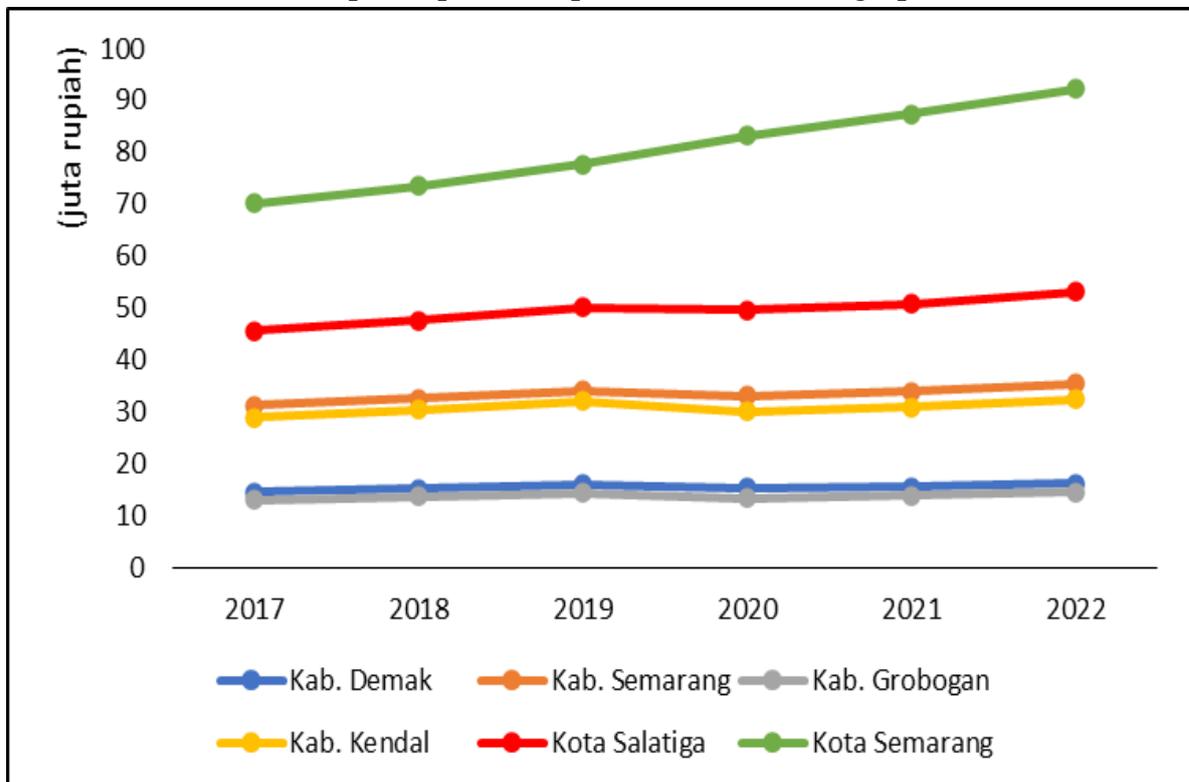
Keterangan:

$\lambda$  = laju konvergensi

$T$  = *half life of convergence*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur



Gambar 2. PDRB per kapita kabupaten/kota di Kedungsepur, 2017-2022

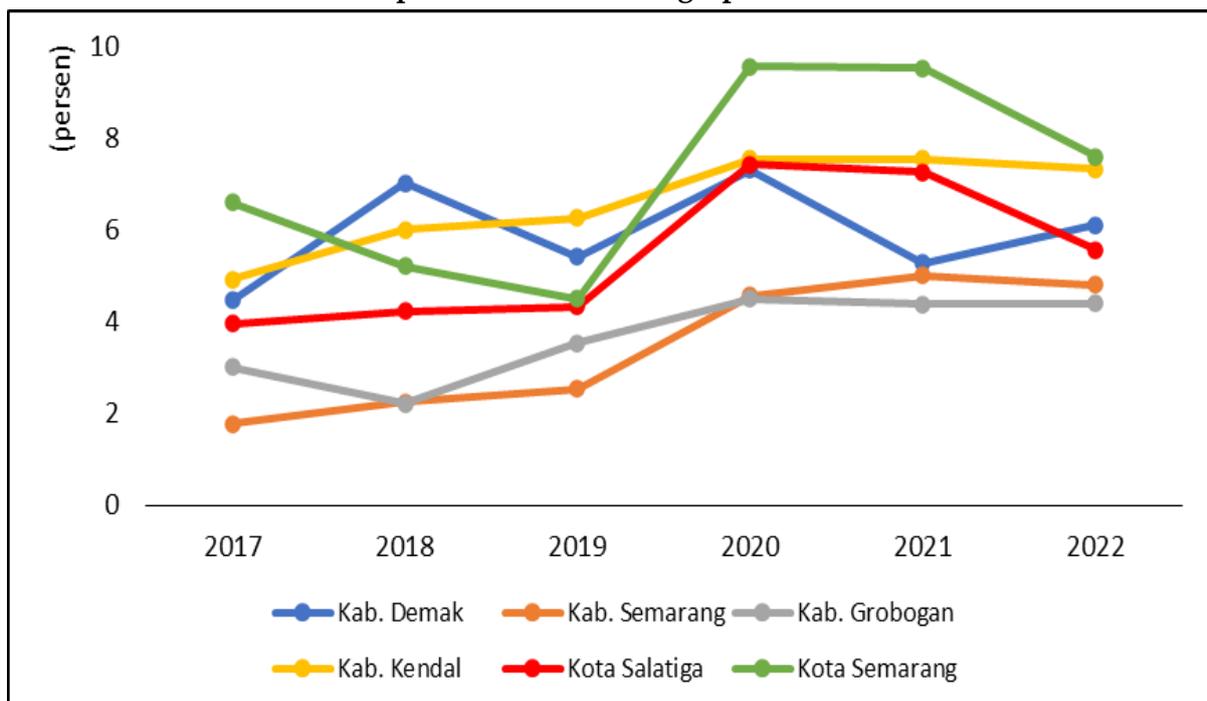
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa terjadi ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Kedungsepur tahun 2017-2022. Pergerakan tren PDRB per kapita dari kabupaten/kota di Kedungsepur tahun 2017-2022 cenderung sama, kecuali pada tahun 2020. Terlihat bahwa hanya Kota Semarang yang mengalami peningkatan PDRB per kapita di tahun tersebut, sedangkan kabupaten/kota lain mengalami penurunan. Terdapat penurunan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 8,85 persen sehingga menyebabkan nilai PDRB per kapita Kota Semarang mengalami peningkatan. Penyebab penurunan jumlah penduduk di Kota Semarang adalah pandemi Covid-19, dimana pada saat itu Kota Semarang merupakan daerah dengan kasus kematian tertinggi di Jawa Tengah akibat Covid-19 yaitu sebanyak 1.652 jiwa per 31 Desember 2020 (Pemkot Semarang, 2020).

Kota Semarang sebagai pusat perekonomian di Kawasan Kedungsepur seharusnya mampu menaikkan perekonomian daerah lain, khususnya daerah yang berbatasan langsung. Akan tetapi, Gambar 2 menunjukkan bahwa PDRB per kapita yang memiliki nilai terdekat dengan Kota Semarang dalam enam tahun terakhir adalah Kota Salatiga. Letak Kota Salatiga tidak berbatasan langsung dengan Kota Semarang sehingga dalam hal ini Kota Semarang belum dapat memaksimalkan perannya sebagai pusat perekonomian di

Kawasan Kedungsepur. Fenomena ini dapat terjadi salah satunya karena manfaat kebijakan di pusat pembangunan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh daerah sekitarnya (Mahfuzah & Maimunah, 2019). Apabila melihat RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021, diketahui bahwa daerah tersebut memiliki fokus pembangunan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui ketahanan pangan serta peningkatan infrastruktur khususnya dalam hal pengendalian banjir. Dua kebijakan tersebut tentu saja hanya dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang, sedangkan masyarakat daerah sekitarnya tidak akan merasakan dampaknya. Selain itu, daerah perbatasan Kota Semarang yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak memiliki gap kualitas sumber daya manusia yang cukup jauh dengan Kota Semarang. Secara rata-rata dalam enam tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Semarang adalah 83,1. Sedangkan IPM pada ketiga daerah yang berbatasan dengan Kota Semarang hanya berkisar di angka 72 hingga 74. Tingkatan kualitas sumber daya manusia pada daerah sekitar Kota Semarang ini sangat penting, sebab keberhasilan suatu daerah dalam mengeksploitasi sumber daya alam salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas (Tyas & Ikhasni, 2015).

#### Gambaran Umum TPT Kabupaten/Kota di Kedungsepur

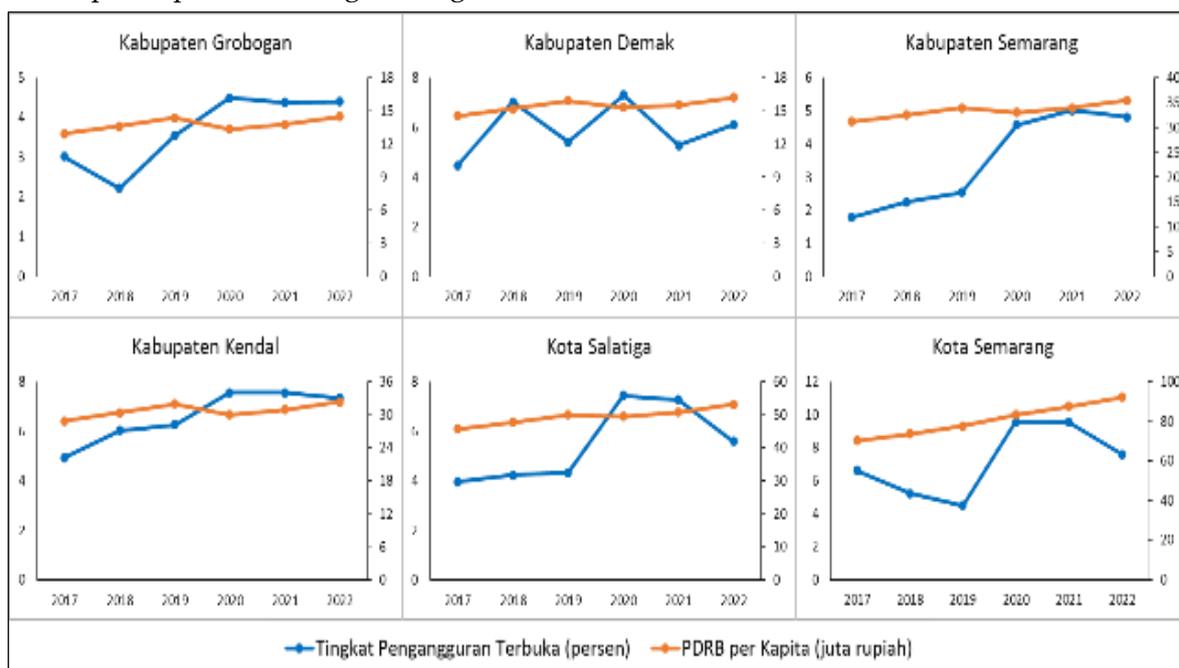


Gambar 3. TPT kabupaten/kota di Kedungsepur (persen), 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 3, perkembangan TPT kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur cenderung fluktuatif. Akan tetapi, secara umum seluruh kabupaten/kota memiliki tren TPT yang meningkat dalam periode tersebut. Pada tahun 2020 seluruh kabupaten/kota di Kedungsepur mengalami peningkatan TPT, dimana Kota Semarang berada di posisi tertinggi dengan kenaikan sebesar 5,07 persen poin. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun

2020 menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat menurun. Hal ini kemudian berdampak pada pengurangan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan jumlah pengangguran (Sani et al., 2022). Perkembangan TPT di Kota Semarang setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, kecuali di tahun 2020. Kemudian perkembangan TPT Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga tidak terlalu fluktuatif. Selama enam tahun terakhir, TPT Kabupaten Semarang naik sebesar 3,03 persen poin. TPT Kabupaten Kendal juga mengalami kenaikan sebesar 2,41 persen poin. Kemudian TPT Kota Salatiga naik sebesar 1,62 persen, sedangkan Kabupaten Grobogan hanya naik 1,38 persen semenjak tahun 2017. Terakhir, perkembangan TPT di Kabupaten Demak terlihat paling fluktuatif di antara kabupaten/kota lainnya. Fluktuasi tingkat pengangguran ini dapat disebabkan oleh adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Demak. Diketahui bahwa terjadi pengurangan tenaga kerja pada sektor pertanian yang lebih cepat dibandingkan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa. Selama tahun 2020-2022 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 18,66 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa masing-masing hanya 3,56 persen dan 6,41 persen (BPS, 2022). Lalu, Gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan TPT akan diikuti dengan penurunan PDRB per kapita di masing-masing daerah.



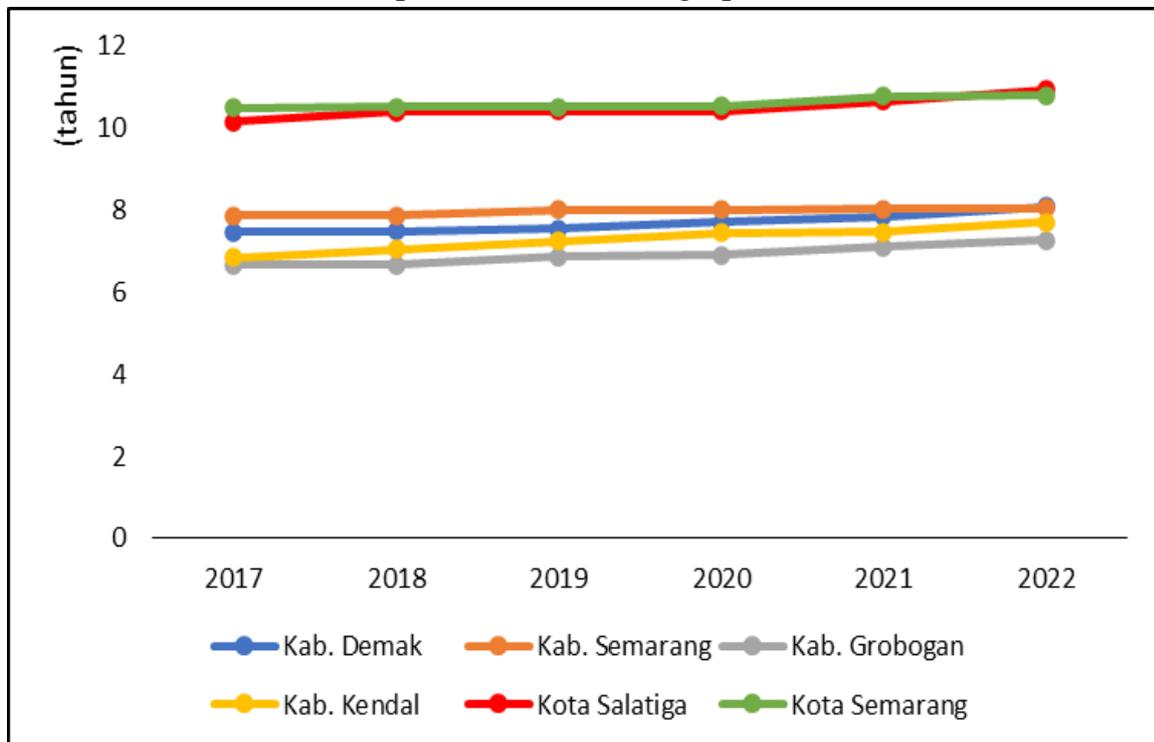
Gambar 4. TPT dan PDRB per kapita Kawasan Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 5, terlihat jelas terjadi ketimpangan kualitas SDM dalam hal pendidikan antara daerah kota dengan kabupaten di Kawasan Kedungsepur tahun 2017-2022. Kota Semarang dan Kota Salatiga berada di atas daerah kabupaten lainnya dengan selisih yang cukup jauh. Rata-rata RLS pada daerah kota adalah selama 10,55 tahun, sedangkan pada daerah kabupaten hanya selama 7,47 tahun. Adanya gap sebesar 3,08

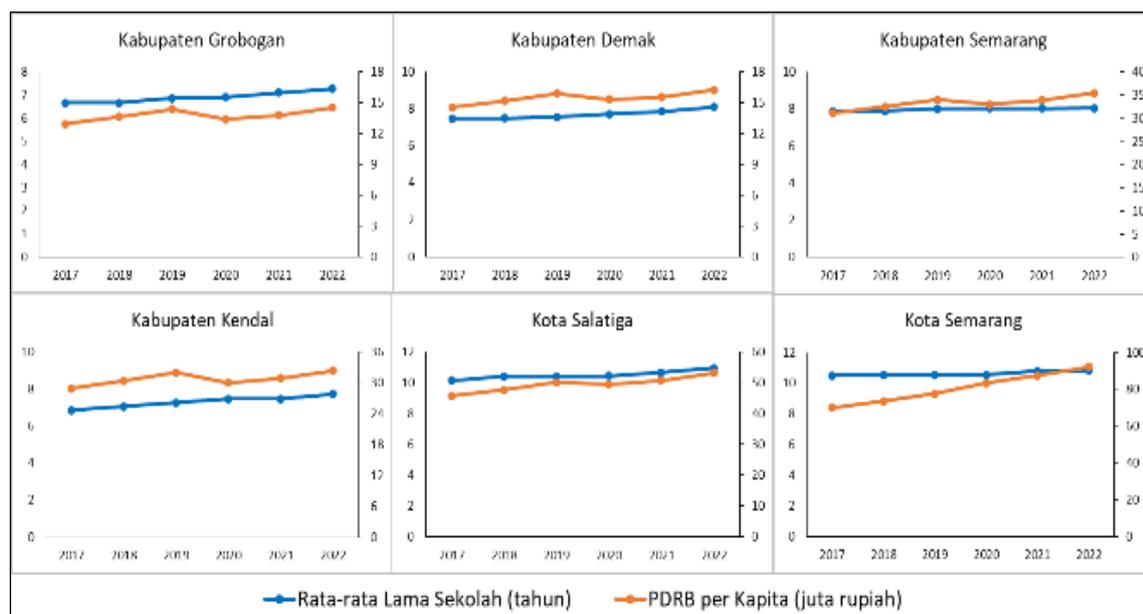
tahun ini mengindikasikan bahwa penduduk di daerah kota rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih lama 3 tahun dibandingkan penduduk kabupaten di Kawasan Kedungsepur tahun 2017-2022. Kemudian, Gambar 6 menunjukkan bahwa peningkatan RLS cenderung akan diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita di setiap daerah.

**Gambaran Umum RLS Kabupaten/Kota di Kedungsepur**



Gambar 5. RLS kabupaten/kota di Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

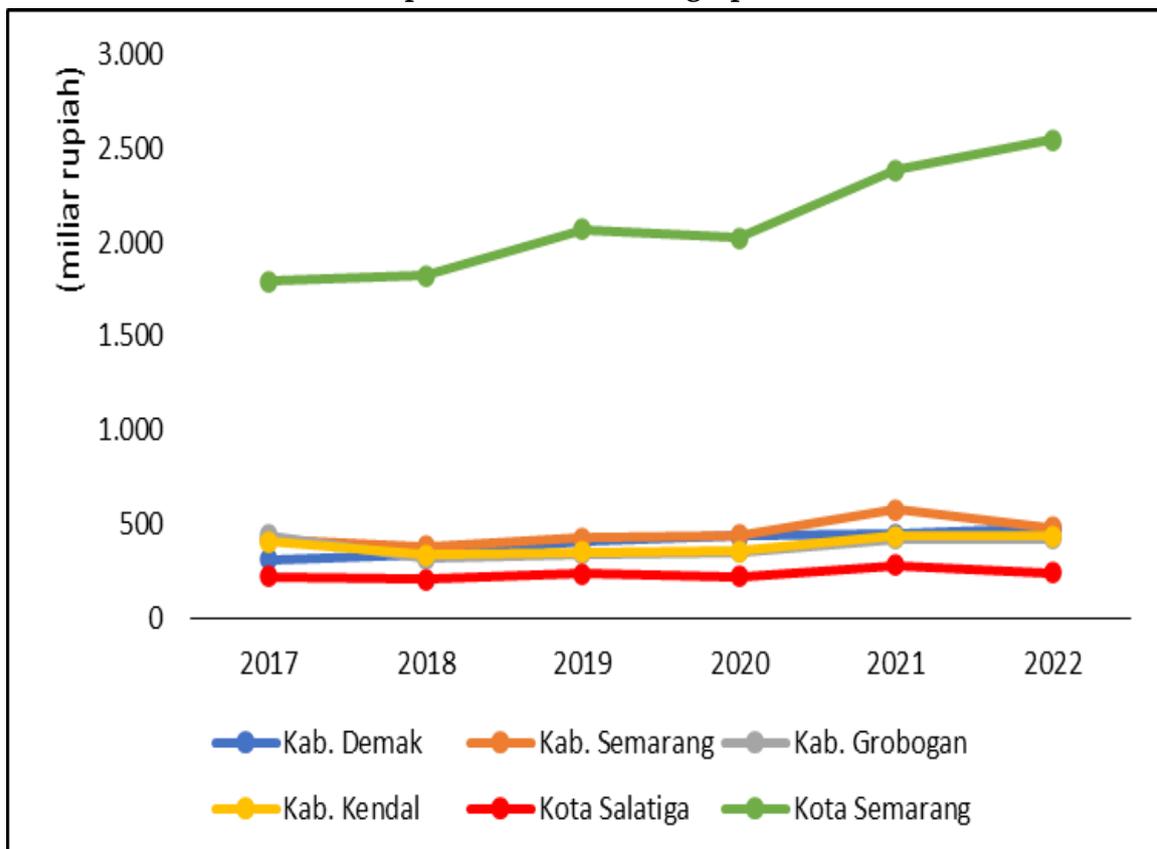


Gambar 6. RLS dan PDRB per kapita Kawasan Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

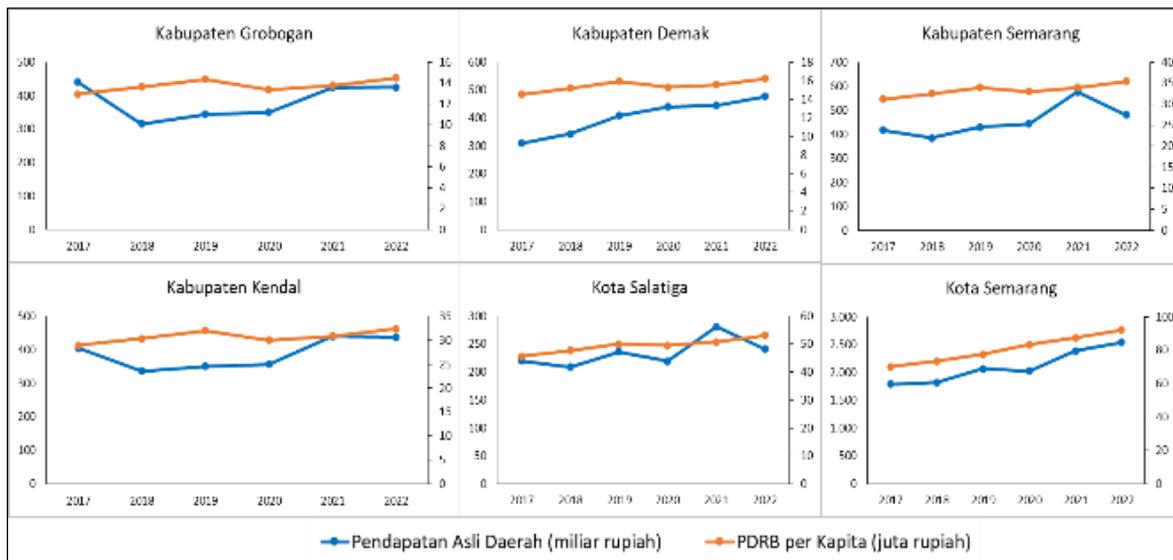
Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa PAD Kota Semarang berada jauh di atas dari PAD kabupaten/kota lainnya di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2022. PAD Kota Semarang mengalami perkembangan yang selalu meningkat, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kontribusi pajak daerah di Kota Semarang dalam peningkatan PAD ini cukup besar. Pada tahun 2022, pajak daerah menyumbang sebesar 78 persen dari total PAD daerah tersebut. Diketahui bahwa Kota Semarang memang melakukan dorongan lebih terhadap pajak restoran, hotel, pajak bumi dan bangunan, dan pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peningkatan PAD yang tinggi juga terjadi di Kabupaten Demak. Selama enam tahun terakhir, PAD Kabupaten Demak mampu meningkat sebesar 54,13 persen dibandingkan keadaan awal di tahun 2017. Kemudian diketahui bahwa PAD Kabupaten Semarang sempat mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2022, tetapi selalu berada di posisi kedua setelah Kota Semarang sejak tahun 2019. Selanjutnya, Kabupaten Kendal pun mengalami penurunan PAD di tahun 2018 dan 2022. Lalu perkembangan PAD Kota Salatiga selalu mengalami penurunan setiap dua tahun sekali selama periode penelitian. Terakhir, perkembangan PAD Kabupaten Grobogan sempat mengalami penurunan di tahun 2018, kemudian setelahnya terus meningkat tetapi belum melebihi kondisi di tahun 2017. Kemudian, berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa terjadi peningkatan PDRB per kapita pada saat PAD daerah tersebut meningkat.

#### Gambaran Umum PAD Kabupaten/Kota di Kedungsepur



Gambar 7. PAD kabupaten/kota di Kedungsepur, 2017-2022

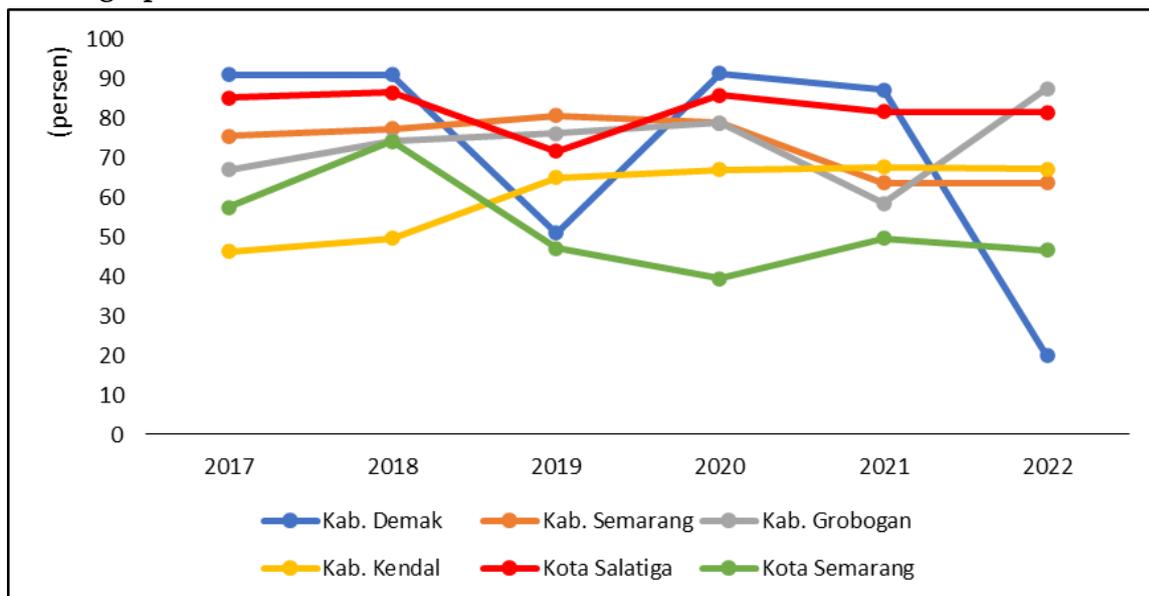
Sumber: BPS, diolah



Gambar 8. PAD dan PDRB per kapita Kawasan Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

### Gambaran Umum Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Kabupaten/Kota di Kedungsepur

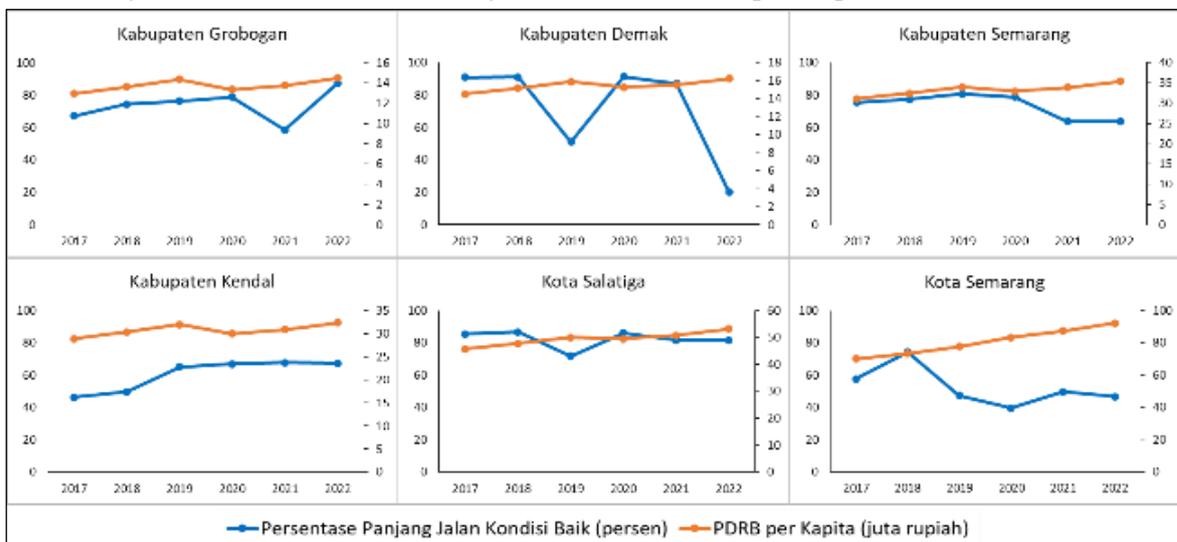


Gambar 9. Persentase jalan kondisi baik kabupaten/kota di Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 9, persentase panjang jalan kondisi baik di Kedungsepur cenderung fluktuatif. Kabupaten Grobogan selalu meningkatkan persentase jalan kondisi baik kecuali di tahun 2021. Hal ini dikarenakan dalam periode 2017-2021, Kabupaten Grobogan telah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu target utama pembangunan daerah tersebut (Pemprov Jateng, 2019). Keadaan yang sama juga terjadi di Kabupaten Kendal. Hal ini merupakan dampak adanya Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur bahwa pemerintah harus melakukan percepatan

pembangunan infrastruktur jalan. Di lain sisi, Kota Semarang justru terus mengalami penurunan pada persentase jalan dalam kondisi baik dalam enam tahun terakhir. Di tahun 2022 tercatat bahwa hanya 46,7 persen dari total panjang jalan Kota Semarang yang dikategorikan baik. Kerusakan jalan ini salah satunya disebabkan oleh seringnya lalu lintas angkutan barang dengan berat yang berkisar antara 3-10 ton (Bappeda Kota Semarang, 2021). Kemudian di Kabupaten Semarang juga mengalami tren persentase panjang jalan kondisi baik yang cenderung menurun sejak tahun 2019. Selanjutnya dalam enam tahun terakhir, Kota Salatiga selalu memiliki panjang jalan kondisi baik di atas 80 persen kecuali di tahun 2019 yang sempat menurun cukup besar. Terakhir di Kabupaten Demak terlihat bahwa terjadi penurunan yang drastis pada tahun 2019 dan 2022. Penyebab utama penurunan persentase jalan kondisi baik di daerah ini adalah adanya banjir rob (Pemprov Jateng, 2021). Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pergerakan PDRB per kapita, berdasarkan Gambar 10 terlihat bahwa kenaikan persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebagian besar tidak diikuti dengan kenaikan PDRB per kapita.



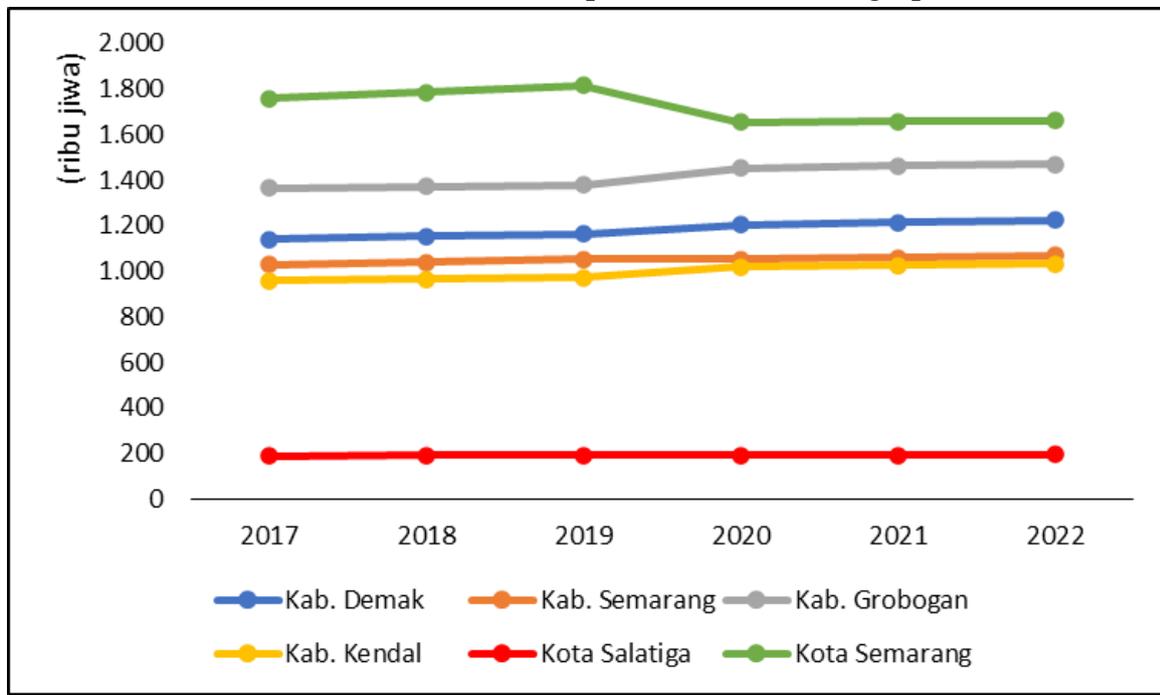
Gambar 10. Persentase jalan kondisi baik dan PDRB per kapita Kawasan Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 11, diketahui bahwa Kota Semarang memiliki penduduk yang paling banyak diantara kabupaten/kota Kedungsepur selama tahun 2017-2022. Kondisi ini wajar mengingat Kota Semarang merupakan pusat perekonomian di Kedungsepur sehingga masyarakat cenderung untuk menuju pusat perekonomian karena berharap akan mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas yang lebih baik (Myrdal, 1957). Di lain sisi, jumlah penduduk terendah di Kedungsepur adalah Kota Salatiga. Hal ini dikarenakan oleh luas wilayah Kota Salatiga yang paling kecil dari kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya, diketahui bahwa Kabupaten Semarang sempat mengalami penurunan jumlah penduduk di tahun 2020 sebesar 0,07 persen. Kemudian di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal jumlah penduduk selalu meningkat selama enam tahun terakhir. Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 7,69 persen dari tahun

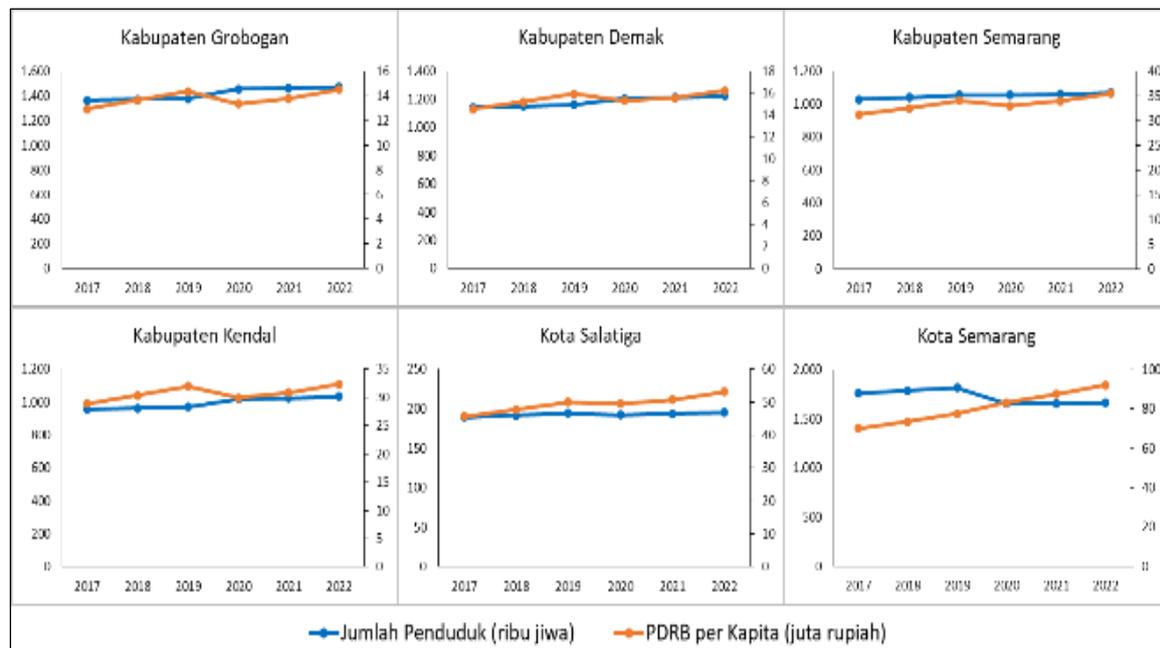
2017-2022. Kemudian Kabupaten Demak tumbuh sebesar 7,24 persen dan Kabupaten Kendal meningkat 7,98 persen pada periode yang sama. Terakhir, Gambar 12 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk dan PDRB per kapita memiliki tren yang berlawanan khususnya di tahun 2020 yang terlihat jelas.

**Gambaran Umum Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Kedungsepur**



Gambar 11. Jumlah penduduk kabupaten/kota di Kedungsepur, 2017-2022

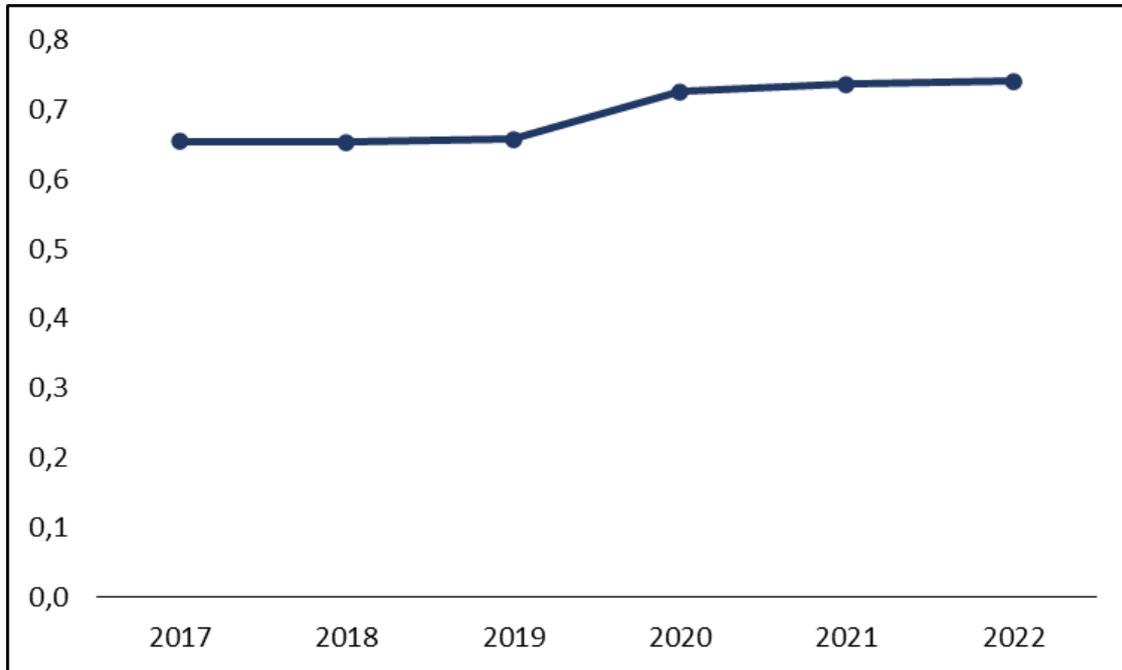
Sumber: BPS, diolah



Gambar 12. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita Kawasan Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

### Indeks Williamson



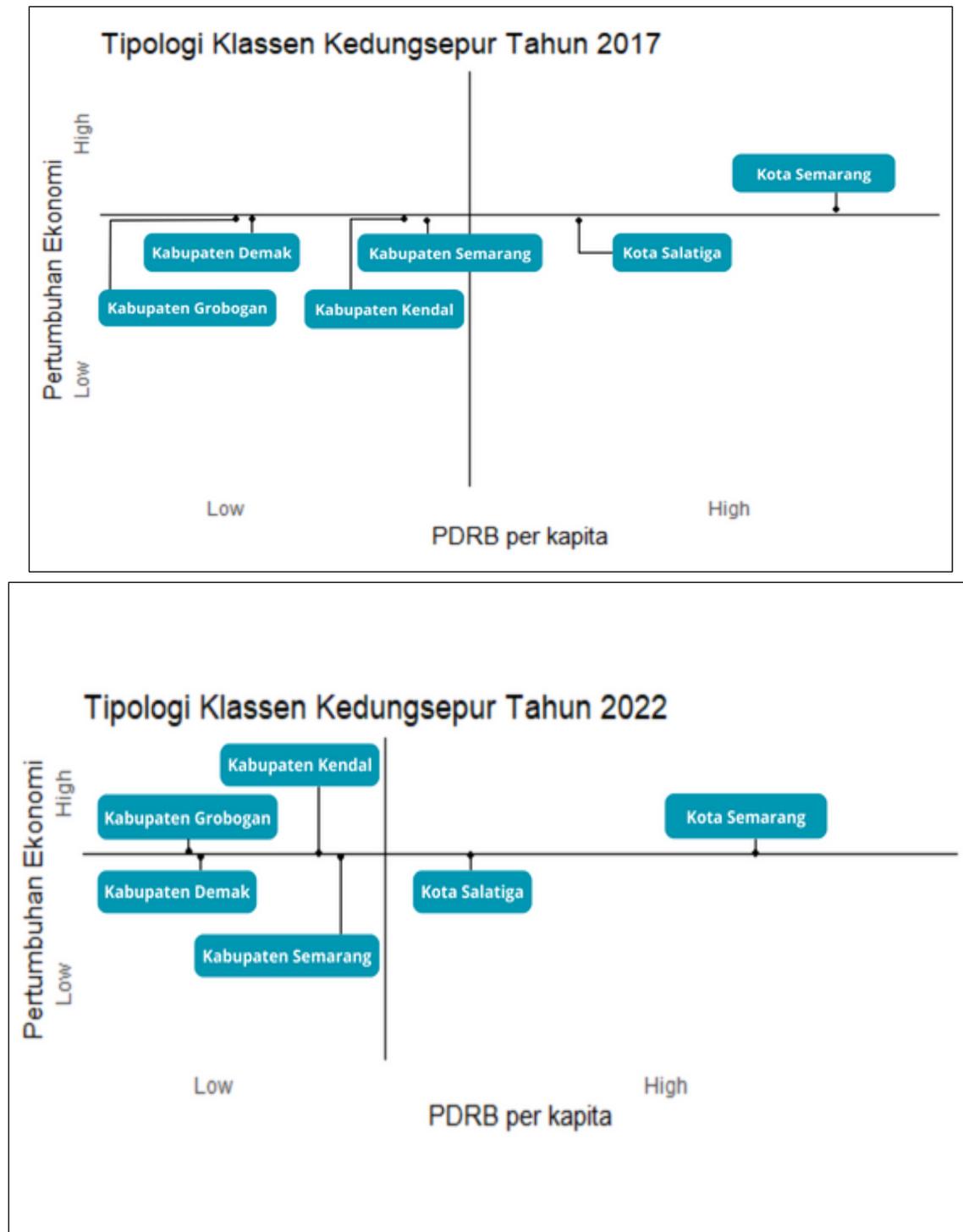
Gambar 13. Indeks Williamson Kawasan Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 13, selama periode 2017-2022 tren Indeks Williamson cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020, dimana nilainya mencapai 0,726. Kenaikan ini sejalan dengan yang disajikan pada Gambar 2, yaitu adanya pertumbuhan pada PDRB per kapita Kota Semarang sebesar 7,25 persen, sedangkan kabupaten/kota lain di Kedungsepur mengalami penurunan (BPS, 2022). Maka dari itu, ketimpangan yang terjadi di Kawasan Kedungsepur semakin tinggi sehingga akan menaikkan nilai Indeks Williamson. Kemudian penurunan Indeks Williamson hanya terjadi di tahun 2018, namun dengan selisih yang sangat kecil dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 0,001. Secara rata-rata nilai Indeks Williamson di Kawasan Kedungsepur selama 2017-2022 adalah 0,694 atau dapat dikatakan disparitas pendapatan di kawasan tersebut cukup tinggi.

### Tipologi Klassen

Berdasarkan Gambar 14, pada tahun 2022 terjadi transisi pola perekonomian pada Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan. Kedua daerah ini dikelompokkan sebagai daerah sedang berkembang, dimana sebelumnya merupakan daerah relatif tertinggal.



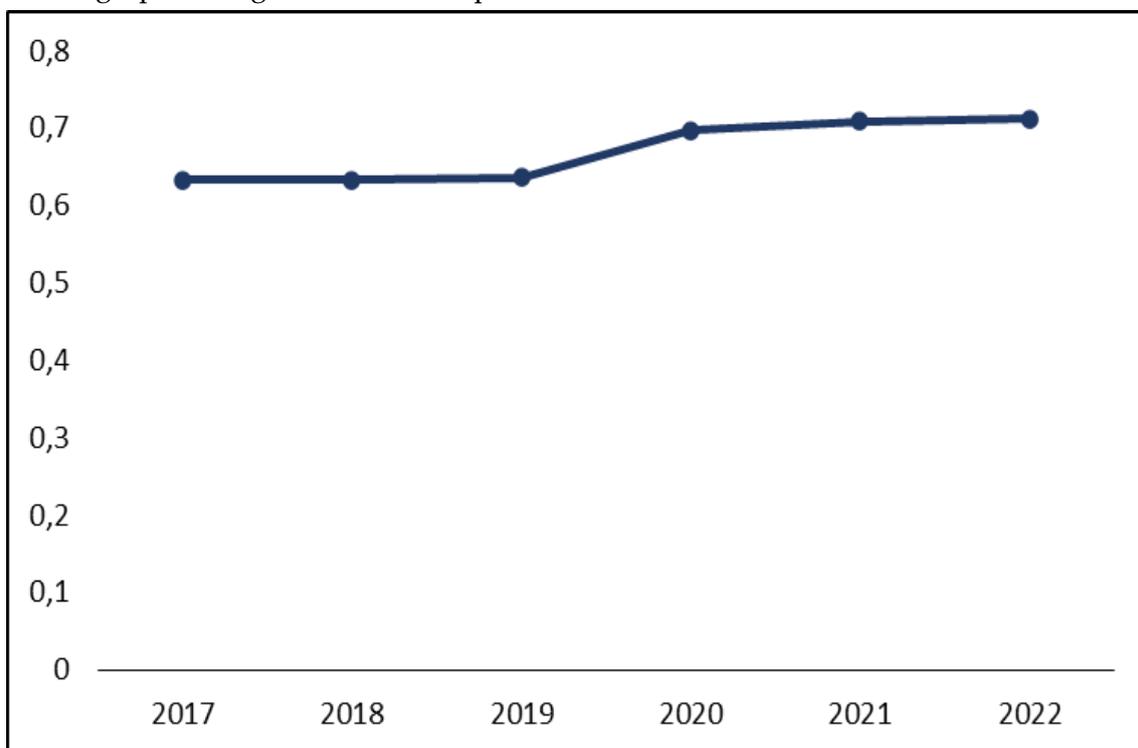
Gambar 14. Tipologi Klassen Kawasan Kedungsepur, 2017 dan 2022  
Sumber: BPS, diolah

Kedua daerah ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan. Diketahui bahwa selama enam tahun terakhir terjadi peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan sebesar 34,6 persen, sedangkan di Kabupaten Kendal meningkat sebesar 44,9 persen (BPS, 2022). Selain itu, di Kabupaten Kendal juga sedang dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal yang mampu menciptakan iklim investasi yang baik bagi pelaku

usaha di berbagai negara. Kota Semarang tetap digolongkan sebagai daerah maju dan tumbuh cepat, namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang hampir sama dengan Kedungsepur. Diketahui pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami peningkatan yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kedungsepur. Hal ini merupakan konsekuensi dari fokus pembangunan jangka menengah Kota Semarang yang lebih memerhatikan aspek peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian daerah lainnya tidak mengalami transisi perekonomian dalam enam tahun terakhir.

### Konvergensi Sigma

Berdasarkan Gambar 15, secara umum tren koefisien variasi PDRB per kapita di Kedungsepur mengalami kenaikan pada tahun 2017-2022.



Gambar 15. Koefisien Variasi PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur, 2017-2022

Sumber: BPS, diolah

Kenaikan koefisien variasi tertinggi terjadi pada tahun 2020. Besarnya kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan PDRB per kapita di Kota Semarang, sedangkan PDRB per kapita kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan di tahun tersebut. Adanya kenaikan nilai koefisien variasi dari tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima setiap penduduk antar kabupaten/kota di Kedungsepur bersifat heterogen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi konvergensi sigma atau masih terdapat ketimpangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur pada periode 2017-2022. Tidak terjadinya konvergensi sigma dan adanya tren yang meningkat

pada Indeks Williamson semakin menguatkan kesimpulan bahwa ketimpangan pendapatan di Kawasan Kedungsepur pada tahun 2017-2022 semakin tinggi.

### Konvergensi Beta Absolut

Berdasarkan Tabel 2, pada uji Sargan diperoleh statistik uji  $S = 6$  sedangkan nilai  $\chi^2_{(9)} = 16,919$  sehingga diputuskan gagal tolak  $H_0$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan variabel instrumen yang digunakan valid. Kemudian hasil uji AB  $m_2$  memberikan nilai statistik uji  $m_2 = -1,0904$ . Karena nilai  $m_2 > -Z\alpha/2$  maka diputuskan gagal tolak  $H_0$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada *error first difference* orde kedua sehingga hasil estimasi telah konsisten. Kemudian, diketahui estimasi koefisien lag PDRB per kapita untuk *pooled least square* dan *fixed effect* sebesar 1,0006 dan 0,2052. Apabila dibandingkan dengan metode GMM, berdasarkan Tabel 2 estimasi koefisien lag PDRB per kapita bernilai kurang dari *pooled least square* dan lebih dari *fixed effect* sehingga penduga yang dihasilkan memenuhi asumsi ketidakbiasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk telah memenuhi syarat variabel instrumen yang valid dan hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias. Adapun ringkasan *output* model FD-GMM yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Ringkasan *output* model FD-GMM Konvergensi Beta Absolut

Parameter	Koefisien	Prob.
$\ln \text{PDRB per kapita}_{t-1}$	0,6516	0,0007*
<b>Lainnya</b>		
Uji Wald	11,4716	0,0007*
Uji Sargan	6	0,7399
Uji AB $m_2$	-1,0904	0,2755
$\lambda$	0,4284	
$T$	1,6180	

\*signiifikan pada  $\alpha = 0,05$

Sumber: Rstudio, diolah

Diketahui bahwa koefisien variabel lag PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan bernilai positif kurang dari satu sehingga terjadi konvergensi beta absolut. Artinya, dengan mengasumsikan seluruh kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur memiliki karakteristik yang sama maka PDRB per kapita antar kabupaten/kota tersebut akan mencapai konvergen atau kondisi ketika kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat untuk mengejar ketertinggalannya. Lebih lanjut, disparitas pendapatan per kapita di Kedungsepur akan berkurang sebesar 42,84 persen per tahun sehingga mampu mengurangi setengah disparitas pendapatan yang terjadi di awal dalam waktu sekitar 1,6 tahun.

### Konvergensi Beta Kondisional

Berdasarkan Tabel 3, pada uji Sargan diperoleh statistik uji  $S = 6$  sedangkan nilai  $\chi^2_{(9)} = 16,919$  sehingga diputuskan gagal tolak  $H_0$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan variabel

instrumen yang digunakan valid. Kemudian hasil uji AB  $m_2$  memberikan nilai statistik uji  $m_2 = -1,883$ . Karena nilai  $m_2 > -Z\alpha/2$  maka diputuskan gagal tolak  $H_0$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada *error first difference* orde kedua sehingga hasil estimasi telah konsisten. Kemudian, diketahui estimasi koefisien *lag* PDRB per kapita untuk *pooled least square* dan *fixed effect* sebesar 0,8191 dan 0,0693. Apabila dibandingkan dengan metode GMM, berdasarkan Tabel 3 estimasi koefisien *lag* PDRB per kapita bernilai kurang dari *pooled least square* dan lebih dari *fixed effect* sehingga penduga yang dihasilkan memenuhi asumsi ketidakbiasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk telah memenuhi syarat variabel instrumen yang valid dan hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias. Adapun ringkasan *output* model FD-GMM yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Ringkasan *output* model FD-GMM Konvergensi Beta Kondisional

Parameter	Koefisien	Prob.
ln PDRB per kapita <sub>t-1</sub>	0,3118	0,0008*
TPT	-0,0097	0,0000*
RLS	0,1275	0,0001*
ln PAD	0,1254	0,0019*
Persen_Jalan Baik	-0,0003	0,1638
ln Pop	-1,1670	0,0000*
<b>Lainnya</b>		
Uji Wald	55.461.794.927	0,0007*
Uji Sargan	6	0,7399
Uji AB $m_2$	-1,8830	0,0597
$\lambda$	1,1654	
$T$	0,5948	

\*signifikan pada  $\alpha = 0,05$

Sumber: Rstudio, diolah

Melalui uji Wald, diperoleh statistik uji  $w = 55.461.794.927$ , sedangkan nilai  $\chi^2_{(6)} = 12,592$  sehingga diputuskan tolak  $H_0$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita. Kemudian secara parsial menggunakan statistik uji Z dapat disimpulkan bahwa hanya persentase panjang jalan dalam kondisi baik yang tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada tingkat signifikansi 5 persen.

Berdasarkan Tabel 3, koefisien variabel *lag* PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan bernilai positif kurang dari satu sehingga terbukti terjadi konvergensi beta kondisional. Artinya, dengan mengasumsikan seluruh kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain maka PDRB per kapita antar kabupaten/kota tersebut akan konvergen. Selanjutnya, disparitas pendapatan per kapita di Kedungsepur akan berkurang sangat cepat yaitu sebesar 116,54 persen per tahun sehingga

mampu mengurangi setengah disparitas pendapatan yang terjadi di awal hanya dalam waktu 0,59 tahun atau sekitar tujuh bulan.

### **Pengaruh TPT terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur**

TPT sebagai pendekatan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Tabel 4 menjelaskan bahwa ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar satu persen poin, maka akan menurunkan PDRB per kapita secara rata-rata sebesar 0,0097 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil ini sesuai dengan teori yang dijelaskan Solow bahwa ketika jumlah tenaga kerja menurun (terjadi peningkatan pengangguran), maka jumlah output yang dihasilkan akan menurun sehingga pendapatan per kapita suatu daerah akan menurun. Selain itu, hal ini juga memperkuat penelitian Uddin & Rahman (2023) yang mengemukakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita pada negara-negara berkembang.

### **Pengaruh RLS terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur**

RLS sebagai variabel pendekatan modal manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Kawasan Kedungsepur. Ketika rata-rata lama sekolah di suatu daerah meningkat satu tahun, maka secara rata-rata PDRB per kapita daerah tersebut akan meningkat sebesar 0,1275 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Adanya pengaruh yang signifikan dan searah ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen, yaitu modal manusia merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan Bouznit et al. (2022) yang menyatakan bahwa modal manusia yang didekati dengan lamanya waktu bersekolah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap PDRB per kapita riil.

### **Pengaruh PAD terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur**

Selain modal manusia, dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah tentu diperlukan modal dalam konteks finansial. Pada penelitian ini modal finansial didekati dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa ketika pendapatan asli daerah di suatu wilayah mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka PDRB per kapita daerah tersebut akan ikut meningkat yaitu sebesar 0,1254 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil ini sejalan dengan Nasir (2023) yang menyatakan bahwa PAD yang dikelola secara maksimal mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, yang salah satu tujuannya yaitu memajukan perekonomian daerah. Selain itu, hasil ini juga sesuai dengan Novianti (2022) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara signifikan memengaruhi PDRB per kapita dengan hubungan yang searah.

### **Pengaruh Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur**

Selanjutnya, sebagai pendekatan modal fisik atau infrastruktur suatu daerah maka digunakan persentase panjang jalan dalam kondisi baik. Berdasarkan Tabel 2, diketahui

bahwa ketika persentase panjang jalan dalam kondisi baik di suatu daerah meningkat sebesar satu persen poin, maka PDRB per kapita daerah tersebut akan menurun sebesar 0,0003 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Maudita & Susilo (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat ketika arus barang dan jasa semakin lancar, dan hal tersebut dapat dicapai ketika infrastruktur jalan semakin berkembang. Adanya ketidaksesuaian dengan teori inilah yang menyebabkan persentase panjang jalan kondisi baik tidak signifikan memengaruhi PDRB per kapita suatu daerah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Kedungsepur**

Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap PDRB per kapita. Ketika jumlah penduduk suatu daerah mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan menurunkan PDRB per kapita sebesar 1,167 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini tentu sejalan dengan model yang dikembangkan Solow bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk suatu daerah pada akhirnya akan menurunkan PDRB per kapita daerah tersebut. Kemudian temuan penelitian ini juga sejalan dengan Khan et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diketahui terjadi ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Kedungsepur tahun 2017-2022. Sejak 2019, PDRB per kapita Kota Semarang terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan daerah lain. Hal ini diperkuat dengan Indeks Williamson Kedungsepur yang terus meningkat selama enam tahun terakhir. Akan tetapi, terjadi transisi pola perekonomian pada beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal mulai bertumbuh sehingga dikategorikan daerah sedang berkembang.

Kemudian eksistensi konvergensi sigma belum dapat dibuktikan di Kawasan Kedungsepur. Hal ini mengartikan bahwa masih terdapat ketimpangan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur pada periode 2017-2022. Akan tetapi, eksistensi konvergensi beta dapat dibuktikan di Kawasan Kedungsepur. Masuknya variabel independen pada model membuat konvergensi beta kondisional terjadi lebih cepat dibandingkan konvergensi beta absolut. Diketahui bahwa RLS dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, sedangkan TPT dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara persentase panjang jalan kondisi baik tidak berpengaruh signifikan.

Untuk itu, saran yang dapat diajukan terkait hasil penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten/kota di Kedungsepur diharapkan mampu menggali potensi daerahnya dengan lebih baik. Perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM, pendapatan daerah, kesempatan kerja, serta pengendalian jumlah penduduk yang baik supaya kondisi ketimpangan di

Kedungsepur dapat berkurang. Lalu, untuk pemerintah Kota Semarang yang merupakan pusat Kawasan Kedungsepur diharapkan berperan sebagai penggerak perekonomian bagi daerah sekitarnya. Kota Semarang dapat menjalin kerja sama strategis dengan pemda sekitar guna merencanakan pembangunan yang terintegrasi dan melakukan sharing knowledge untuk meningkatkan kapasitas SDM daerah sekitarnya. Terakhir, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan analisis pada tingkat yang lebih tinggi yaitu antar kawasan di Jawa Tengah. Hal ini ditujukan untuk melihat efektivitas pembentukan sistem kawasan dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Barro, R. J. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223–251. <https://doi.org/10.1086/261816>
- Bouznit, M., Pablo-Romero, M. P., & Sánchez-Braza, A. (2022). Economic growth, human capital, and energy consumption in Algeria: evidence from cointegrating polynomial regression and a simultaneous equations model. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(9), 23450–23466. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23657-7>
- Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.2307/1905364>
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (1985). *Macroeconomics*. McGraw Hill.
- Indrayanti, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 353–363. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Islam, N. (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(4), 1127–1170. <https://doi.org/10.2307/2946651>
- Khan, I., Hou, F., Irfan, M., Zakari, A., & Le, H. P. (2021). Does energy trilemma a driver of economic growth? The roles of energy use, population growth, and financial development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 146, 111157. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111157>
- Mahfuzah, A., & Maimunah. (2019). Implikasi Etika Lingkungan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(2), 127–141. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i1.16>
- Majiid, I. Al, & Woyanti, N. (2023). Analisis Ketimpangan Wilayah dan Potensi Ekonomi di Kawasan Kedungsepur Tahun 2017-2021. *Business Economic Entrepreneurship*, 6(1), 25–37.
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics* (8th ed.).
- Maudita, A. V., & Susilo. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 570–582. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.09>
- Mevia, T. F. S. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Empat Koridor di Jawa Timur Tahun 2016-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(03), 419–437.

- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-Developed Regions*. Gerald Duckworth & Co. Ltd.
- Nasir, A. R. (2023). *Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia: Membangun Kemandirian Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah*. DOTPLUS Publisher.
- Novianti, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jawa Barat tahun 2011-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3235>
- Putro, H. R. D. (2022). Analisis Disparitas dan Konvergensi Pendapatan per Kapita pada Level Kawasan dan Nasional Indonesia Tahun 2015-2021. Universitas Islam Negeri Syarif Hisayatullah Jakarta.
- Sala-i-Martin, X. X. (1996). The Classical Approach to Convergence Analysis. *The Economic Journal*, 106(437), 1019. <https://doi.org/10.2307/2235375>
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>
- Sinaga, M., Zalukhu, R. S., Hutauruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Convergence of Regional GDP per Capita among The Big Islands in Indonesia. *JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2). <https://doi.org/10.29210/020232728>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Raja Grafindo Persada.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Adisson-Wesley.
- Tyas, A. A. W. P., & Ikhasni, K. T. W. (2015). Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Forum Ilmiah*, 12(1), 1–15.
- Uddin, I., & Rahman, K. U. (2023). Impact of corruption, unemployment and inflation on economic growth evidence from developing countries. *Quality & Quantity*, 57(3), 2759–2779. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01481-y>